

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

Syaifur Rahman^{1*}, Sugeng Hartanto², Avisenna Harkat³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Jember Jl. Mastrip PO BOX 164, Jember, Indonesia

*Korespodensi: rahmansyaifur85@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the implementation of the Institutional Level Financial Application System (SAKTI) at the Semarang I State Treasury Service Office. This research is a qualitative research with a case study approach. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation techniques. The selection of informants is based on certain criteria, namely by selecting KPPN employees who act as users or users of SAKTI. Selection is based on employee knowledge and understanding in using the SAKTI application. In accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 171/PMK.05/2021 concerning Implementation of the SAKTI System. The results of the study indicate that the application of the SAKTI application at the Semarang I KPPN has been implemented well and has brought many positive influences and is very supportive of all activities, main tasks and functions of the KPPN.

Keywords: implementation, institution level financial application system, KPPN

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu dengan memilih pegawai KPPN yang berperan sebagai *user* atau pengguna SAKTI. Pemilihan didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman pegawai dalam penggunaan aplikasi SAKTI. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan aplikasi SAKTI pada KPPN Semarang I telah diimplementasikan dengan baik serta membawa banyak pengaruh positif dan sangat mendukung seluruh aktivitas, tugas pokok dan fungsi KPPN.

Kata kunci: penerapan, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, KPPN

PENDAHULUAN

Sistem informasi tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Penyediaan informasi yang digunakan Individu, organisasi, dan komunitas bersumber dari berbagai sistem (Haryu Pambudi & Adam, 2018). Pemerintah Indonesia juga berupaya menyelaraskan kemajuan teknologi informasi yaitu melalui penerapan layanan elektronik yang disebut *e-government* sebagai dasar pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi. Upaya tersebut merupakan penerapan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*. Penerapan *e-government* tertuang dalam bidang pengelolaan keuangan negara dan diimplementasikan dalam bentuk *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) di Indonesia.

Penerapan IFMIS diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi akibat penggunaan sistem yang bersifat manual dalam pengelolaan anggaran. Perbaikan dan perubahan sistem administrasi melalui pemanfaatan teknologi merupakan tuntutan pelayanan publik sebagai dasar keselarasan perkembangan teknologi informasi. Penerapan IFMIS dapat membantu pemerintah dalam upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan pengurangan biaya melalui digitalisasi pengelolaan keuangan. Indonesia sudah mulai mengembangkan *Core Financial Management Information System* (FMIS), dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai core-nya. Namun masih perlu banyak pengembangan untuk menjadi IFMIS yang andal dan sesuai trend terkini (Sudarto, 2019).

Upaya yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut, Kementerian Keuangan mengembangkan sebuah sistem aplikasi yang memiliki integritas tinggi diperuntukkan untuk seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem ini dapat mengintegrasikan proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara. SAKTI dikeluarkan karena pemerintah berupaya mendukung pengelolaan keuangan negara yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegritasi dan berbasis kinerja (Amriana & Iskandar, 2019).

Pengembangan ide SAKTI dibangun melalui penyederhanaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan negara yang digunakan sebelumnya. Aplikasi SAKTI mampu mengintegrasikan berbagai aplikasi eksisting yang digunakan saat ini, seperti Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Aplikasi Persediaan, Sistem Aplikasi Satker (SAS), dan Sistem Informasi Berbasis Akrua (SAIBA) menjadi satu kesatuan dalam aplikasi tunggal. Sesuai dengan kerangka waktu implementasi SAKTI, program SAKTI mulai dilaksanakan tahun 2015 dengan piloting 12 Satker di Kemenkeu dan Satker SPAN (Mukhtaromin, 2018). Perlu diperhatikan juga terkait penelitian yang dikembangkan oleh (Novelia, 2023) yang menyatakan bahwa kualitas sistem dan kualitas layanan mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan pengguna, SAKTI harus memperhatikan kualitas sistem khususnya *response time* dan kemudahan penggunaan (*ease of use*) untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan kinerja pengguna.

Implementasi SAKTI banyak memunculkan tantangan dan permasalahan. Diperlukan upaya sistematis seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga agar sistem ini dapat diterapkan dengan baik. Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan stabilitas sistem, kualitas output, teknis penggunaan, hingga layanan dukungan SAKTI pada tahap piloting awal. (Nasrudin & Widagdo, 2020) menyatakan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan fitur aplikasi yang rumit, sinyal internet yang tidak stabil, laporan yang belum bisa ditampilkan dengan utuh, pelatihan teknis yang minim, komunikasi admin dengan operator yang kurang, baik pusat dan daerah serta masalah-masalah lainnya.

Atas hasil temuan beberapa penelitian yang pernah dilakukan, hanya sekitar 16% proyek IT sektor Inggris yang bisa dinyatakan berhasil, sementara 84% lainnya mengalami kegagalan dalam berbagai tingkatan (Sauer & Cuthbertson, 2003). Kegagalan tersebut disebabkan oleh unsur *simplicity*, *certainly*, dan *stability* pada system yang kurang memadai serta rendahnya dukungan dan kompetensi dari pihak manajerial organisasi. Oleh karena itu,

keberhasilan penerapan SAKTI menjadi prioritas yang harus diutamakan dalam inisiatif yang strategis. Perlu diketahui juga bahwa disamping itu Aplikasi SAKTI telah membantu pengguna meningkatkan produktivitas dan performa kerja, memudahkan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan (Pambudi & Adam, 2015).

Melihat jangkauan yang sangat luas dan berskala nasional tentunya program SAKTI menghabiskan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat banyak. Akan tetapi, pengorbanan yang dikeluarkan kenyataannya belum tentu dapat menjamin keberhasilan implementasi dari program ini. Kegiatan piloting dilakukan seolah hanya melibatkan satu kementerian yaitu dalam lingkungan Kementerian Keuangan saja. Hal ini menjadi sorotan penting bagi pihak inisiator melalui sebuah usaha untuk mendapatkan perhatian yang besar dalam menerapkan program SAKTI tersebut sesuai dengan PMK No.171/PMK.05/2021 yang mengamankan tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Menteri Keuangan, 2021).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dikarenakan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis lebih dalam terkait penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No.34, Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena instansi merupakan salah satu unit yang turut berkontribusi dalam penerapan SAKTI.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik: 1. Observasi, penggunaan metode ini dengan cara peneliti melihat langsung kelapangan untuk mengetahui secara langsung mengenai penerapan aplikasi SAKTI di KPPN Semarang I; 2. Wawancara, metode tanya jawab yang dilakukan dengan maksimal waktu 30 menit menggunakan aplikasi atau alat perekam kepada informan penelitian yakni pegawai KPPN yang bertugas sebagai operator dan validator SAKTI; 3. Dokumentasi, dilakukan dengan mencari sumber informasi dalam bentuk buku, dokumen yang mendukung penelitian seperti jurnal, Peraturan-peraturan yang terkait penerapan aplikasi SAKTI dan lain sebagainya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah: 1. Reduksi Data, dilakukan dengan meringkas dan mengklasifikasikan masalah yang diteliti untuk memfokuskan hasil temuan pada apa yang dianggap penting dan untuk memudahkan pemahaman data yang dikumpulkan di lapangan; 2. Penyajian Data, Kumpulan informasi yang memberikan gambaran tentang keseluruhan penelitian. Gambaran tersebut harus memiliki kesederhanaan dan kejelasan agar mudah dibaca; 3. Kesimpulan, tahap ini peneliti menuliskan kesimpulan mengenai apa yang telah diteliti oleh peneliti tentang bagaimana penerapan aplikasi SAKTI pada KPPN Semarang I.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi aplikasi SAKTI KPPN Semarang I harus dilaksanakan sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti. Aplikasi SAKTI diterapkan untuk menggantikan seluruh aplikasi yang digunakan sebelumnya. Aplikasi SAKTI mampu mengintegrasikan seluruh proses sistem pengelolaan keuangan negara mulai dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan negara yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat karena adanya aplikasi SAKTI. Hal ini membuat perubahan yang sempurna dalam pengelolaan keuangan negara. SAKTI memberikan perubahan disisi penggabungan aplikasi eksisting menjadi satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi dalam satu sistem yang didalamnya terdapat berbagai modul. Modul tersebut terdiri dari Modul Penganggaran untuk proses perencanaan dan penganggaran, modul Komitmen, Bendahara, Aset Tetap, Persediaan dan Pembayaran untuk proses pelaksanaan serta modul G/L dan pelaporan untuk proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Modul

tersebut saling berkaitan satu sama lain dan menghasilkan beberapa output dari modul itu sendiri. Instansi pemerintah khususnya KPPN Semarang I berpedoman pada modul aplikasi sebagai berikut:

Tabel 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Aplikasi SAKTI

Perencanaan dan Penganggaran	Pelaksanaan	Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Modul Administrasi, Modul Penganggaran	Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Aset, Modul Persediaan, Modul Piutang	Modul G/L dan Pelaporan

Sumber : Data Dokumentasi Tahun 2022 KPPN Semarang I

“Aplikasi berbasis desktop sangat bertele-tele dan banyak menimbulkan permasalahan. Usaha untuk menyempurnakan dan mempermudah satker dalam menggunakan aplikasi yang berbeda dan terpisah serta untuk meminimalisir permasalahan seperti hilangnya backup data dan proses yang berulang padahal muara dan tujuan dari proses pengelolaan keuangan dari hulu ke hilir sama. Aplikasi SAKTI hadir sangat memenuhi kebutuhan satker karena aplikasi ini terintegritasi dan terpusat pada satu titik pengelolaan data serta berbasis web sehingga saling berkaitan dari siklus transaksi ke transaksi lainnya.” (Operator User SAKTI KPPN Semarang I)”.

Penerapan aplikasi SAKTI di KPPN Semarang I telah berbasis web yang sebelumnya berbasis desktop, fleksibilitas penggunaan SAKTI dapat terjamin karena dapat diakses dimana saja asal ada koneksi internet. Upaya pengembangan dan perbaikan terus dilakukan terkait penggunaan SAKTI. Pengembangan dan perbaikan dilaksanakan dalam rangka penyesuaian dan pemahaman tenaga kerja atau pengguna dari seluruh proses transaksi aplikasi SAKTI. KPPN Semarang I juga bertindak sebagai trainer pembimbingan teknis yang dilakukan secara daring maupun luring. Pembimbingan teknis yang dilakukan satker KPPN Semarang I sesuai dengan waktu dan timeline yang telah ditentukan serta mengacu pada juknis terkait tool aplikasi yang dibuat dalam website resmi KPPN Semarang I.

“....., Pengimplementasian aplikasi sakti tidaklah mudah, namun yang perlu diketahui aplikasi SAKTI merupakan sebuah sistem aplikasi yang sangat penting dan besar pengaruhnya pada pengelolaan keuangan di negara ini. Aplikasi sakti merupakan program inovasi yang baru yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai wujud perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Aplikasi sakti sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan piloting sebagai tahap awal uji coba untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala dalam penggunaannya, kemudian ditambah dengan sosialisasi, berupa coaching dan mentoring ataupun bimtek secara internal sebagai bentuk penyesuaian dan pemahaman kepada pengguna sangat dibutuhkan. Pada Tahun 2022, seluruh satker, kementerian lembaga diwajibkan untuk menerapkan dan menggunakan aplikasi SAKTI.” (Operator User SAKTI KPPN Semarang I)

Proses penerapan SAKTI dilaksanakan secara bertahap dan melalui beberapa proses pengembangan dalam implementasinya. Kegiatan sosialisasi dan pengenalan SAKTI merupakan serangkaian proses kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka uji coba penggunaan aplikasi SAKTI. Di Tahun 2022 pemerintah memberlakukan kebijakan bahwa seluruh Kementerian/Lembaga diwajibkan menggunakan aplikasi SAKTI. Setiap pengguna aplikasi SAKTI harus menyesuaikan perbedaan-perbedaan implementasi dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan. Berikut merupakan pembagian peran pengguna SAKTI di KPPN Semarang I: 1. Farhan Fatnanto merupakan Approver Aset dan Approver Anggaran; 2. Henny Misriantono merupakan Approver Pembayaran dan Validator Aset; 3. Wijayanti Wahyu Widyangrum merupakan Bendahara Pengeluaran, Operator Pembayaran, dan Operator Pelaporan; 4. R. Dwi Koerniadi Widodo merupakan Anggaran Validator, Approver Komitmen PPK dan Validator Pembayaran PPK; 5. Ida Nurkayadi merupakan Operator Komitmen dan Operator Anggaran; 6. Suswanto merupakan Operator Aset; dan 7. Widya Edu Nugroho merupakan Operator Persediaan.

Peran tersebut saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari setiap modul yang ada dalam aplikasi SAKTI. Terdapat 4 orang pemegang *user* SAKTI pada KPPN Semarang I yang berperan sebagai Administrator, Operator, *Validator* dan *Approver*. Administrator merupakan pegawai yang ditetapkan untuk melaksanakan fungsi teknis administrasi SAKTI. Operator SAKTI bertugas mengoperasikan, membuat dan merekam transaksi data SAKTI, yang terdiri dari Operator pembayaran, pelaporan, komitmen, anggaran, asset dan persediaan. *Validator* atau petugas yang memvalidasi data dari seorang operator, pada KPPN Semarang I terdiri dari PPSPM dan PPK yang diperankan oleh Kasubbag umum dan Kepala Seksi. Sedangkan *Approver* yaitu pegawai yang bertanggungjawab dan menyetujui seluruh transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan dalam aplikasi SAKTI dan biasanya diperankan oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Kepala Kantor KPPN Semarang I.

Setiap pengguna SAKTI di KPPN Semarang I dapat memainkan peran lebih dari satu *user* SAKTI. Melihat hal tersebut, dalam segi Sumber Daya Manusia (SDM) KPPN Semarang I masih kurang untuk menjalankan *tools* aplikasi, karena melihat kapasitas dan kualitas organisasi terhadap beban kerja organisasi yang dijalankan. Apabila pengguna *user* SAKTI menggunakan dua peran atau lebih, maka cenderung akan terjadi masalah dalam pengoperasian aplikasi SAKTI, selain itu dapat mengurangi efisiensi waktu yang digunakan karena harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari peran yang dilakukan. Namun, tidak akan menjadi suatu permasalahan apabila regulasi tidak berbenturan dan pegawai pengguna SAKTI dapat menyeimbangkan kapan dapat menjalankan masing-masing peran *user* SAKTI tersebut. Melihat kondisi ini, beberapa peran yang dimainkan oleh satu orang pengguna SAKTI bukan menjadi suatu permasalahan yang signifikan dari keberlangsungan penerapan aplikasi SAKTI di KPPN Semarang I.

“...sebagai konfirmasi untuk melangkah ke data atau transaksi selanjutnya Setiap user tersebut akan diberikan OTP. OTP diberlakukan sebagai bentuk keamanan dari aplikasi SAKTI, sehingga tidak akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.”
(Validator User SAKTI KPPN Semarang I).

Bendahara KPPN Semarang I juga menyatakan bahwa setiap ingin melangkah ke tahapan data atau transaksi selanjutnya, aplikasi SAKTI memberikan sebuah OTP (*On Time Password*). OTP digunakan sebagai bentuk keamanan dan konfirmasi yang diberikan oleh KPPN Semarang I selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) kepada satker yang ingin melakukan transaksi dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga aplikasi SAKTI tidak dapat digunakan dan diakses oleh orang lain atau pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain dalam hal akses aplikasi, SAKTI memiliki penyimpanan yang besar, terintegritasi dan terjamin keamanannya.

KPPN Semarang I selain sebagai satker yang melaksanakan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, juga sebagai pelaksana kewenangan dari Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Dalam pelaksanaannya, KPPN Semarang I mengimplementasikan aplikasi SAKTI yang berinterkoneksi dengan SPAN (Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara). Dengan adanya aplikasi SAKTI, proses pelaksanaan perbendaharaan seperti penyaluran pembiayaan atas beban negara serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Kas Negara. Sebagaimana yang disampaikan Bendahara KPPN Semarang I saat kegiatan wawancara.

“sebagai BUN KPPN Semarang I menggunakan aplikasi dengan penamaan SPAN yang fungsinya seperti halnya proses penerimaan SPM dan pembuatan SP2D. tentunya SAKTI juga terintegrasi dengan aplikasi SPAN. Perekaman dan pengentrian data transaksi menggunakan SAKTI, sedangkan SPAN sebagai pembuatan nomor SPM dan SP2D, dan secara otomatis langsung berinterkoneksi, berbeda halnya sebelum adanya aplikasi SAKTI beberapa aplikasi berfungsi saling terpisah...” **(Validator User SAKTI KPPN Semarang I).**

Tingkat pemahaman pengguna terhadap aplikasi SAKTI sangat mendukung kelancaran penggunaan aplikasi. Kondisi pegawai KPPN Semarang I pada tingkat pemahaman dipengaruhi oleh tingkatan umur, sehingga apabila umur pegawai pengguna *user* SAKTI

sudah lanjut usia maka pemahaman terhadap sistem SAKTI tergolong rendah dan juga sebaliknya. Mengatasi hal tersebut, kegiatan mentoring dan pembelajaran terkait penerapan dan penggunaan SAKTI harus lebih diperhatikan dan dimaksimalkan. *Transfer knowledge* perlu disalurkan agar tidak terjadi pemutusan pengetahuan dari proses kerja yang telah dijalankan, sehingga pegawai pengganti tidak merasa bingung dan dapat menjalankan tugasnya sebagai pemegang peran *user* SAKTI dengan baik dan benar.

“SAKTI sangat luar biasa karena membawa dampak positif terkait pemrosesan pengelolaan keuangan negara. memonitoring SPM yang dibuat oleh operator menjadi lebih mudah karena tidak memerlukan tandatangan basah sebagai pengesahan atas SPM yang dibuat, lebih mudah menatausahakan dokumen pembayaran, dan seluruh transaksinya bertahap dalam rangka menghindari penyalahgunaan.” (Validator User SAKTI KPPN Semarang I).

“Penggunaan aplikasi SAKTI sangat berdampak besar pada aktivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, khususnya di KPPN Semarang I. Penggunaan aplikasi SAKTI sangat memudahkan penginputan, perekaman dan proses pencetakan data, tanpa harus menggabungkan ADK satu dengan yang lainnya. Proses pengelolaan APBN sangat terdukung dengan adanya aplikasi SAKTI. Di harapkan dengan adanya aplikasi ini pengelolaan keuangan negara dapat unggul di tingkat dunia.” (Operator User SAKTI KPPN Semarang I).

Kepentingan manajerial internal pada KPPN Semarang I dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya akses informasi keuangan pada SAKTI sehingga memudahkan dan mempercepat dalam pengambilan keputusan. Perubahan positif dan membangun dapat dirasakan oleh KPPN Semarang I dari penerapan aplikasi SAKTI terkait pengelolaan keuangan dimulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban laporan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegritasi dan berbasis kinerja.

PEMBAHASAN

KPPN Semarang I telah menggunakan aplikasi SAKTI berbasis *Web* karena untuk fleksibilitas penggunaan aplikasi tersebut. Sebelum berbasis *Web*, awalnya KPPN Semarang I menggunakan aplikasi SAKTI berbasis *Desktop*, hal ini dirasa kurang maksimal dalam akselerasi pelaporan dan pertanggungjawaban. Sampai dengan saat ini upaya pengembangan aplikasi SAKTI masih terus dilakukan. Layanan dan fitur yang ada didalamnya selalu di *upgrade* setiap kali ada perubahan peraturan. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi SAKTI dapat menciptakan pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Pengembangan aplikasi yang berkelanjutan memiliki tujuan mempermudah pengguna, serta dapat mengurangi kesalahan yang akan timbul dikemudian hari (Sari & Isnaini, 2021). Pengembangan aplikasi SAKTI dimaksudkan untuk memanfaatkan teknologi informasi agar lebih efisien (Hanafiah et al., 2019).

Sebagai upaya penyesuaian dan pemahaman tenaga kerja atau pengguna dari seluruh proses transaksi KPPN Semarang I melaksanakan sosialisasi dan *running* penggunaan SAKTI. Pelaksanaan pembimbingan dilakukan secara *daring* dan *luring* dengan waktu dan *timeline* yang telah ditentukan serta mengacu pada *juknis* terkait *tool* aplikasi yang dibuat dalam *website* resmi KPPN Semarang I. Terdapat 5 orang pemegang *user* SAKTI pada KPPN Semarang I yang berperan sebagai Administrator, Operator, Validator dan 31 Approver. Administrator merupakan pegawai yang ditetapkan untuk melaksanakan fungsi teknis administrasi SAKTI. Operator SAKTI yaitu pegawai yang bertugas mengoperasikan, membuat dan merekam transaksi data SAKTI, yang terdiri dari Operator pembayaran, pelaporan, komitmen, anggaran, asset dan persediaan. Validator atau petugas yang memvalidasi data dari seorang operator, pada KPPN Semarang I terdiri dari PPSPM dan PPK yang diperankan oleh Kasubbag umum dan Kepala Seksi. Sedangkan Approver yaitu pegawai yang bertanggungjawab dan menyetujui seluruh transaksi dan laporan keuangan yang dihasilkan dalam aplikasi SAKTI dan biasanya diperankan oleh seorang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Kepala Kantor KPPN Semarang I.

Apabila pengguna *user* SAKTI menggunakan dua peran atau lebih, maka cenderung akan terjadi masalah dalam pengoperasian aplikasi SAKTI, selain itu dapat mengurangi

efisiensi waktu yang digunakan karena harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari peran yang dilakukan. Tujuan dari penggunaan aplikasi SAKTI menurut (Veronika et al., 2022) adalah pengelolaan keuangan negara menjadi lebih sederhana untuk digunakan. Oleh karena itu harapannya adalah duplikasi pekerjaan dapat dikurangi dan pengulangan entry data juga semakin sedikit. Namun, informan penelitian menegaskan terkait duplikasi pekerjaan tidak akan menjadi suatu permasalahan apabila regulasi tidak berbenturan dan pegawai pengguna SAKTI dapat menyeimbangkan kapan dapat menjalankan masing-masing peran user SAKTI. Melihat kondisi ini, beberapa peran yang dimainkan oleh satu orang pengguna SAKTI bukan menjadi suatu permasalahan yang signifikan dari keberlangsungan penerapan aplikasi SAKTI di KPPN Semarang I. yang terpenting adalah diperlukan kualitas sistem dan kualitas informasi yang mampu mencakup seluruh kepentingan dari penggunaanya (Hadi, 2022).

Aplikasi SAKTI mampu membuat penyampaian informasi pengelolaan keuangan negara semakin tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Proses pengerjaan dan pembuatan laporan keuangan sangat mudah karena hanya membutuhkan rekam dan cetak saja. Berbeda dengan sebelum adanya SAKTI, pengumpulan ADK dari setiap aplikasi eksisting membuat data yang dikumpulkan rentan terjadi kesalahan. Selain itu, SAKTI memiliki tingkat keamanan yang menjamin proses dari pengelolaan keuangan tersebut, yaitu dengan adanya tanda tangan elektronik atau On Time Password (OTP). OTP berperan menjaga kredibilitas dan keamanan data pada setiap tindakan atau proses transaksi, sehingga tidak mudah hilang dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini merupakan bentuk adanya kemajuan teknologi di era digitalisasi yang membuat kemudahan dan kelancaran dalam pengelolaan pemerintahan terkhusus di bidang pengelolaan keuangan negara. Beberapa keunggulan SAKTI diantaranya adalah 1. Akuntansi berbasis akrual, 2. Interkoneksi dengan SPAN, 3. Tidak perlu mengelola banyak aplikasi, 4. Tidak perlu ke KPPN berkali-kali, 5. Satu basis data untuk semua modul, 6. Satu basis data untuk semua unit (DJPb, 2020).

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di KPPN Semarang I berhasil diterapkan dan diimplementasikan dengan baik dan telah sesuai berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 yang mengatur tentang pelaksanaan sistem SAKTI. Dengan adanya aplikasi ini, sangat membantu dan memudahkan KPPN Semarang I dalam melaksanakan proses pengelolaan perbendaharaan dan keuangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Penerapan aplikasi SAKTI pada KPPN Semarang I membawa banyak pengaruh positif dan membangun dalam seluruh aktivitas pelaksanaan, tugas pokok dan fungsinya. Integrasi data dan fitur yang ada dalam SAKTI, memudahkan pengguna *user* SAKTI dalam proses penggunaan aplikasi. Tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dan keamanan data SAKTI juga sangat membantu kelancaran dan kredibilitas dalam seluruh transaksi dan pengoperasiannya. Selain itu, fasilitas dan layanan pendukung seperti perangkat komputer dan jaringan internet telah baik dan memadai sehingga aplikasi SAKTI pada KPPN Semarang I mampu diterapkan dan diimplementasikan dengan baik.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu selama proses wawancara terhadap informan, ketidakberhasilan dalam melakukan wawancara dengan seluruh pengguna SAKTI dikarenakan adanya beberapa kendala, antara lain keadaan kesehatan dari informan, mutasi atau perpindahan posisi serta kesibukan atas pekerjaan yang dilakukan pada saat jam kerja. Keterbatasan lain dikarenakan ketidakmampuan untuk menggali informasi dengan informan secara lebih mendalam lagi terkait dengan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dikarenakan faktor usia pegawai yang kurang menguasai Teknologi dan Informasi.

Adapun saran dan rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai masukan dalam penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I yaitu dengan memanfaatkan dan memaksimalkan inovasi teknologi dan informasi aplikasi SAKTI dengan cara meningkatkan pemahaman SDM dari seluruh tools aplikasi didalamnya, baik dengan mempelajari petunjuk dan teknis, mengikuti sosialisasi dan bimtek SAKTI ataupun menjalankan transfer knowledge dengan baik. Selain itu, perlunya dilakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap penerapan aplikasi SAKTI di KPPN Semarang I.

DAFTAR RUJUKAN

- Amriana, T. N., & Iskandar, A. (2019). Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 54-74. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.409>
- DJPb, K. K. (2020). *Penyusunan RKA K/L DIPA 2020 menggunakan SAKTI berbasis Web*. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Sekayu/Id/Data-Publikasi/Berita-Terbaru/2864-Sakti-Sistem-Aplikasi-Kuangan-Tingkat-Instansi.Html>.
- Hadi, M. (2022). Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sakti (Berdasarkan Perspektif Pengguna). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 390-397. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1164>
- Hanafiah, M. A., Sulistiyono, Niwanda, L. R., Widiarto, P., & Niwanda, R. L. (2019). SAKTI, Wujud Inovasi Pengelolaan Keuangan Negara. In *DJPb Treasury Indonesia*.
- Haryu Pambudi, K., & Adam, H. (2018). ANALISIS DIMENSI KESUKSESAN IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN DELONE AND MCLEAN INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODEL. 1, 1-32.
- Menteri Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, 3, 1.
- Mukhtaromin. (2018). Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 588-602.
- Nasrudin, E., & Widagdo, A. K. (2020). Determinan Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Pengaruhnya Terhadap Individu dan Organisasi. In *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* (Vol. 1, Issue 1, pp. 69-94). <https://doi.org/10.33105/jmp.v1i1.351>
- Novelia, E. A. (2023). *Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Pengguna Pada Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lahat*.
- Pambudi, K. H., & Adam, H. (2015). ANALISIS DIMENSI KESUKSESAN IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN DELONE AND MCLEAN INFORMATION SYSTEM SUCCESS MODEL. *Universitas Brawijaya*.
- Sari, R. K., & Isnaini, F. (2021). *Perancangan Sistem Monitoring Persediaan Stok Es Krim Campina Pada Pt Yunikar Jaya Sakti*. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)*.
- Sauer, C., & Cuthbertson, C. (2003). The State of IT Project Management in the UK 2002-2003. *Management*, 1-82.
- Sudarto. (2019). Pengembangan integrated financial management information system (IFMIS)

di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 87-103. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.127>

Veronika, M. W., Putri, A. M., & Suci, R. G. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA PENATA USAHA ANGGARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU. *Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal*, 6(2), 205-218.